



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIC INDONESIA**

A

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 9 September 2016 No. 72

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : MULIANA, S.H.
- 2. Jabatan : SEKRETARIS DPRD
- 3. Alamat Kantor : Jl. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK
- 4. Tanggal Pelaporan : 24 Maret 2015

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK Rp. **136.600.000**
(TANAH DAN BANGUNAN)

- 1. Tanah & Bangunan seluas 313 m2 & 90 m2, di Kabupaten DEMAK, yang berasal dari HASIL SENDIRI , perolehan dari tahun 1995 sampai dengan 1997 NJOP Rp.136.600.000

B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI Rp. **144.000.000**
DAN MESIN LAINNYA

- 1. Mobil, merk DAIHATSU TERIOS, tahun pembuatan 2010, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2014 nilai jual Rp.130.000.000
- 2. Motor, merk YAMAHA JUPITER Z, tahun pembuatan 2011, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011 nilai jual Rp.9.000.000
- 3. Motor, merk HONDA SUPRA X, tahun pembuatan 2006, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2010 nilai jual Rp.5.000.000

b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA Rp.	0
c. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.	10.000.000
1. LOGAM MULIA, yang berasal dari WARISAN, perolehan dari tahun 1990 sampai dengan 2010 dengan nilai jual Rp.10.000.000		
C. SURAT BERTAHAGA Rp.	0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA Rp.	48.758.448
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp.48.758.448		
E. PIUTANG Rp.	0
TOTAL HARTA (II) Rp.	339.358.448
III. HUTANGRp.	17.875.000
1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG sebesar Rp.17.875.000		
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III) Rp.	321.483.448

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

